

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber ketahanan nasional bermula pada semangat kolektifitas, yang merupakan strategi efektif dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, hal itu terealisasi melalui kemerdekaan Indonesia. Berjuang tanpa memperhatikan suku atau golongan ini menjadi identitas bangsa sehingga mampu mengantarkan Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum. Shofa (2016, hlm. 34) menjelaskan Multikultural merupakan realitas yang tidak mungkin dihindari, karena bangsa Indonesia memiliki ratusan kelompok etnik serta ribuan suku bangsa. Kondisi ini merupakan berkah apabila kita mampu mengelolanya dalam sebuah keterpaduan, guna memperkuat ketahanan nasional.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kebudayaan Indonesia tercantum bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Sesuai dengan legitimasi tersebut, negara harus mempelajari dan melindungi, bahkan melestarikan kebudayaan nasional sebagai identitas dan kekuatan bangsa. Akan tetapi, Mahfud (2016, hlm. 98) berpendapat bahwa “penciptaan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural tidak mudah, sehingga dibutuhkan konsep yang kuat supaya tidak dapat terombang-ambing oleh kondisi lingkungan”.

Politik identitas merupakan upaya politik dalam menguatkan identitas kebangsaan. Bertentangan dengan Debora (2017, hlm. 18) yang menjelaskan setiap orang dapat terlegitimasi untuk melakukan perbedaan SARA sesuai kepentingan maupun pandangan politiknya. Perbedaan SARA yang selama ini merupakan bentuk pluralisme berbalik dan membuat masyarakat aktif dalam melakukan politik balas dendam dengan sentimen identitas. Kontestasi Politik akhirnya membuat perbedaan SARA semakin terlihat. Masyarakat yang majemuk dengan kesadaran telah mengkotakan dirinya sesuai dengan persamaan SARA dalam menentukan pilihan politik. Adapun Alfaqi (2015, hlm. 113) menjelaskan

“politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya, guna mewujudkan tujuan tertentu misalnya sebagai bentuk perlawanan atau untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tertentu”.

Berdasarkan paham multikulturalisme, politik identitas merupakan cara hidup berdampingan serta saling menghargai mencerminkan kepribadian bangsa yang harus dipertahankan. Karakter berbasis pada kearifan lokal dapat menguatkan agama, budaya, serta peradaban, yang memperkuat karakter generasi muda guna merevitalisasi ketahanan bangsa (Mahardika, 2017, hlm. 18). Citra negatif terhadap politik identitas saat ini menjadi masalah yang harus diperhatikan, penyebabnya ada pada perkembangan teknologi, maraknya informasi yang bersifat politis pada media dan tidak diikuti oleh cerdasnya masyarakat.

Syamsi (2017) menyatakan bahwa politik identitas jangan terlalu dibesarkan dan dijadikan momok menakutkan. Jawaban terhadap pertanyaan tidak harus hitam putih. Tergantung defenisi dan kecenderungan yang diajukan setiap orang. Terpenting dalam mengkritisi politik identitas jangan parsial dan memihak. Seolah praktik politik identitas menjadi ancaman demokrasi ketika dilakukan oleh kelompok tertentu. Di dunia Barat saja, kecenderungan itu menjadi bagian dari proses politik yang tidak menjadi aspek yang berbahaya.

Hemay dan Munandar (2016, hlm. 1738) menjelaskan perilaku politik pemilih dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak berdiri sendiri, akan tetapi, saling berkaitan dengan aspek lain. Misalnya, faktor isu dan kebijakan politik, faktor agama, adanya sekelompok orang yang memilih kandidat tertentu, karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya. Selain itu, beberapa memilih kandidat tertentu karena dianggap mewakili kelas sosialnya. Bahkan ada juga kelompok yang memilih kandidat tertentu sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur.

Konteks ideal mengenai perilaku politik perlu untuk diketahui secara akademis agar dapat memberikan kontribusi akademis akan perkembangan keilmuan politik, terutama yang berkaitan antara politik identitas dan perilaku politik. Hasil penelitian Trinugraha (2013, hlm. 185) menjelaskan bahwa menjadi

anak muda Tionghoa di Indonesia tidaklah mudah. Mereka berada dalam cengkeraman sosial karena tidak bisa lepas dari berbagai label dan stereotip yang telah hidup dan berkembang sejak ratusan tahun di negeri ini. Mereka dibedakan dan didiskriminasikan oleh masyarakat di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Secara nyata, mereka telah mengidentifikasi diri sebagai individu atau kelompok plural yang terus bergerak dan berubah sehingga bukan sebagai sebuah individu maupun kelompok yang tunggal dan final. Terlihat dari kaca mata apapun, hal tersebut harus dihindari demi terwujudnya kesetaraan antar anak bangsa. Jika terjadi kesalahan persepsi di mata masyarakat, politik identitas berpotensi merusak integrasi nasional.

Pemahaman yang sama akan konsensus nasional merupakan pondasi kuat dalam membentuk negara berkarakter. Kebijakan pendidikan politik yang berkualitas dapat mempercepat terwujudnya warga negara yang cerdas sehingga tidak mudah terhasut oleh kepentingan politik jangka pendek.

Perilaku politik berupa pengamalan hak dan kewajiban, kontribusi pada kepentingan umum, serta melestarikan nilai dan budaya kedaerahan. Dicitakan oleh berbagai pihak karena menunjukkan perilaku warga negara yang cerdas dan baik. diperkuat oleh pendapat Sutrisno (2018. hlm. 43) menjelaskan sejalan dengan peran dan fungsi PPKn, guna menanamkan paham ideologi Pancasila, yang di dalamnya terdapat nilai dasar perikemanusiaan serta perikeadilan, serta tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yaitu aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Pancasila sebagai ideologi nasional mampu mengatasi paham perseorangan serta golongan. Semboyan '*bhinneka tunggal ika*' diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberi makna dan menunjukkan tujuan negara serta berupaya meletakkan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan yang lainnya (Asmaroini, 2017, hlm. 55).

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan berdirinya negara Indonesia yakni, "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Samsuri (dalam Sulianti, 2018, hlm. 49) menjelaskan bahwa tujuan PPKn salah satunya adalah mengembangkan partisipasi bermutu, serta bertanggung jawab mewujudkan kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, nasional, maupun global. Hal tersebut memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. Terdapat tiga komponen pembelajaran PPKn yang dipelajari dan dikembangkan yaitu, *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.

Penelitian ini memang bukan penelitian pertama mengenai politik identitas, akan tetapi penelitian mempunyai kemenarikan atau pembaharuan dari penelitian terdahulu, diantaranya: 1) fokus penelitian ini menjelaskan hubungan antara politik identitas terhadap perilaku politik, hal itu belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, 2) fokus penelitian yang dilakukan di kota Bandung merupakan pembaharuan penelitian, dikarenakan bersifat aktual, 3) menguatkan perguruan tinggi sebagai *centre of knowledge* dalam memahami fenomena politik secara akademis.

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu dilaksanakan penelitian ini, supaya tidak terjadi salah persepsi dan masyarakat mampu menjadi agen pembangunan nasional. Penting bekerja sama dalam mewujudkan negeri Indonesia yang *Baladatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah teruraikan pada latar belakang penelitian, penulis membuat rumusan masalah penelitian supaya terarah dan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang disinggung dalam latar belakang penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap politik identitas di kota Bandung?
- b. Bagaimana pola perilaku politik masyarakat di kota Bandung?
- c. Adakah hubungan antara politik identitas dengan perilaku politik masyarakat di kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap politik identitas di kota Bandung.
- b. Untuk mengetahui mengetahui pola perilaku politik masyarakat di kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui adakah hubungan antara politik identitas dengan perilaku politik masyarakat di kota Bandung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat terhadap perkembangan ilmu politik, khususnya mengenai politik identitas baik bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Diketuainya persepsi masyarakat terhadap politik identitas di kota Bandung.
- b. Diketuainya pola perilaku politik masyarakat di kota Bandung.
- c. Diketuainya hubungan antara politik identitas dengan perilaku politik masyarakat di kota Bandung.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai politik identitas dan membentuk karakter kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan.
- b. Memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban politiknya. Hal ini berguna pula dalam pelestarian kebudayaan bangsa.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik dan melestarikan kebudayaan daerah yang merupakan identitas nasional bangsa Indonesia.

## **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, dan stuktur organisasi skripsi.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka dan kerangka pemikiran dalam penelitian.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan dan beberapa komponen seperti: pendekatan penelitian, jenis penelitian, design penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data dan penafsiran data.

### **BAB IV : Temuan dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi tentang temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan dengan bentuk sesuai urutan rumusan permasalahan penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi mengenai pembahasan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

### **BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Pada bab ini berisi tentang penarikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi dari permasalahan yang diteliti, serta saran dari penulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.